

# **RENCANA STRATEGIS 2016-2021**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KOTA BATAM**

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Strategis (Renstra) OPD untuk jangka waktu 5 tahun, dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Daerah dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD).

Sebagaimana amanat tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai kewenangan dan tugas pokok dan fungsinya. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam berdasarkan RPJMD Kota Batam Periode 2016-2021.

Rencana Strategis yang disusun oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam merupakan langkah awal untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dalam pengelolaannya perlu melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset daerah secara tertib, taat peraturan-perundangan, efektif, efisien, transparan, professional dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat, juga merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode lima (5) tahun yang akan datang, yang dijabarkan kedalam Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam.

Penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam 2016 – 2021 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam dilakukan dengan melihat hasil kegiatan pembangunan yang dicapai pada lima tahun sebelumnya (periode 2011-2016) yang masih bergabung dengan Sekretariat Daerah, fenomena yang ada, isu strategis yang dihadapi serta mempertimbangkan kajian strategis

sebagai bentuk upaya menjaga keberlanjutan capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baik, serta rumusan kegiatan penting yang belum terlaksana untuk dilaksanakan pada periode selanjutnya. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan, dan merupakan dasar evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam adalah mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor. 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang pengelolaan Keuangan Negara/Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua

- Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  15. Peraturan Daerah Kota Batam No 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam 2005-2025;
  16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 67);
  17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 100).
  18. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 8);
  19. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
  20. Peraturan Walikota Batam Nomor 29 Tahun 2016 tentang Susunan dan Tata Kerja Dinas Daerah;
  21. Peraturan Walikota Batam Nomor 62 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Daerah Kota Batam.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Renstra Organisasi Perangkat Daerah ini merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Organisasi Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RPJPD Kota Batam, yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2016 -2021 dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh

Organisasi Perangkat Daerah dan stakeholders dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah di kota Batam untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan daerah.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam adalah :

1. Menetapkan visi, misi, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam.
2. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat tercapai.
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis dan evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
4. Menjadi kerangka dasar bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.
5. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja OPD, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam adalah :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi

- 2.2 Sumber Daya OPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan OPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

### **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

### **BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

- 4.1 Memuat Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
- 4.3 Strategi dan Kebijakan

### **BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Memuat Tabel rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

### **BAB VI PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN OPD**

#### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam dibentuk berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
2. Peraturan Walikota Batam Nomor 62 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Daerah Kota Batam.

Berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 62 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Daerah Kota Batam, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam mempunyai tugas mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah sesuai dengan kewenangannya.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam mempunyai Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang anggaran, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi dan pelaporan, bidang aset;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang anggaran, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi dan pelaporan, bidang aset;
3. Pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengelolaan anggaran, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi dan pelaporan, bidang aset;
4. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam merupakan OPD penggabungan dari Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Batam dan Bagian Aset Sekretariat Daerah Kota Batam dan berdasarkan peraturan tersebut bahwa Tugas, Fungsi



dan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam adalah sebagai berikut:

Kepala Badan membawahi Sekretariat, 4 (empat) Bidang dan 1 (satu) UPT yaitu:

1. Bidang Anggaran;
2. Bidang Perbendaharaan;
3. Bidang Akuntansi;
4. Bidang Aset.
  - a. Sekretariat Membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Program dan Perencanaan.
  - b. Bidang Anggaran, membawahi 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu:
    1. Sub Bidang Anggaran Pendapatan Daerah;
    2. Sub Bidang Anggaran Belanja Daerah;
    3. Sub Bidang Pengendalian dan Penyediaan Anggaran Belanja Daerah.
  - c. Bidang Perbendaharaan, membawahi 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu:
    1. Sub Bidang Pengeluaran Belanja Daerah;
    2. Sub Bidang Pengelolaan Kas;
    3. Sub Bidang Belanja Pegawai.
  - d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahi 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu:
    1. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan;
    2. Sub Bidang Akuntansi Belanja;
    3. Sub Bidang Pelaporan.
  - e. Bidang Aset, membawahi 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu:
    1. Sub Bidang Perencanaan dan Analisa Kebutuhan Aset Daerah;
    2. Sub Bidang Inventarisasi dan Pelaporan Aset Daerah;
    3. Sub Bidang Penilaian dan Pemanfaatan Aset Daerah.
  - f. UPT Pengelolaan Dana Bergulir, membawahi 1 (satu) Sub Bagian, yaitu:
    1. Sub Bagian Tata Usaha.

Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset serta pengkoordinasian tugas-tugas dibidang.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam mempunyai Fungsi :

- a. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan program dan rencana kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- b. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- c. pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan dan pelayanan administrasi kesekretariatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, program dan anggaran serta keuangan dan aset.
- d. pelaksanaan penginventarisasian, penyusunan dan pengkoordinasian penatausahaan proses penanganan pengaduan.
- e. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang.
- f. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.

Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah, anggaran pembiayaan serta pengendalian dan penyediaan anggaran belanja daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam mempunyai Fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program lingkup anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah, anggaran pembiayaan serta pengendalian dan penyediaan anggaran belanja daerah.

- b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah, anggaran pembiayaan serta pengendalian dan penyediaan anggaran belanja daerah.
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi serta urusan pemerintahan daerah bidang anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah, anggaran pembiayaan serta pengendalian dan penyediaan anggaran belanja daerah.
- d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah, anggaran pembiayaan serta pengendalian dan penyediaan anggaran belanja daerah.

Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah lingkup pengeluaran belanja daerah, pengelolaan kas daerah dan belanja pegawai.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam mempunyai Fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program lingkup pengeluaran belanja daerah, pengelolaan kas daerah dan belanja pegawai.
- b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup pengeluaran belanja daerah, pengelolaan kas daerah dan belanja pegawai.
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi serta urusan pemerintahan daerah bidang pengeluaran belanja daerah, pengelolaan kas daerah dan belanja pegawai
- d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengeluaran belanja daerah, pengelolaan kas daerah dan belanja pegawai.

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah lingkup akuntansi, pelaporan dan pembinaan keuangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam mempunyai Fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program lingkup akuntansi, pelaporan dan pembinaan keuangan daerah.
- b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup akuntansi, pelaporan dan pembinaan keuangan daerah.
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi serta urusan pemerintahan daerah bidang akuntansi, pelaporan dan pembinaan keuangan daerah.
- d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup akuntansi, pelaporan dan pembinaan keuangan daerah.

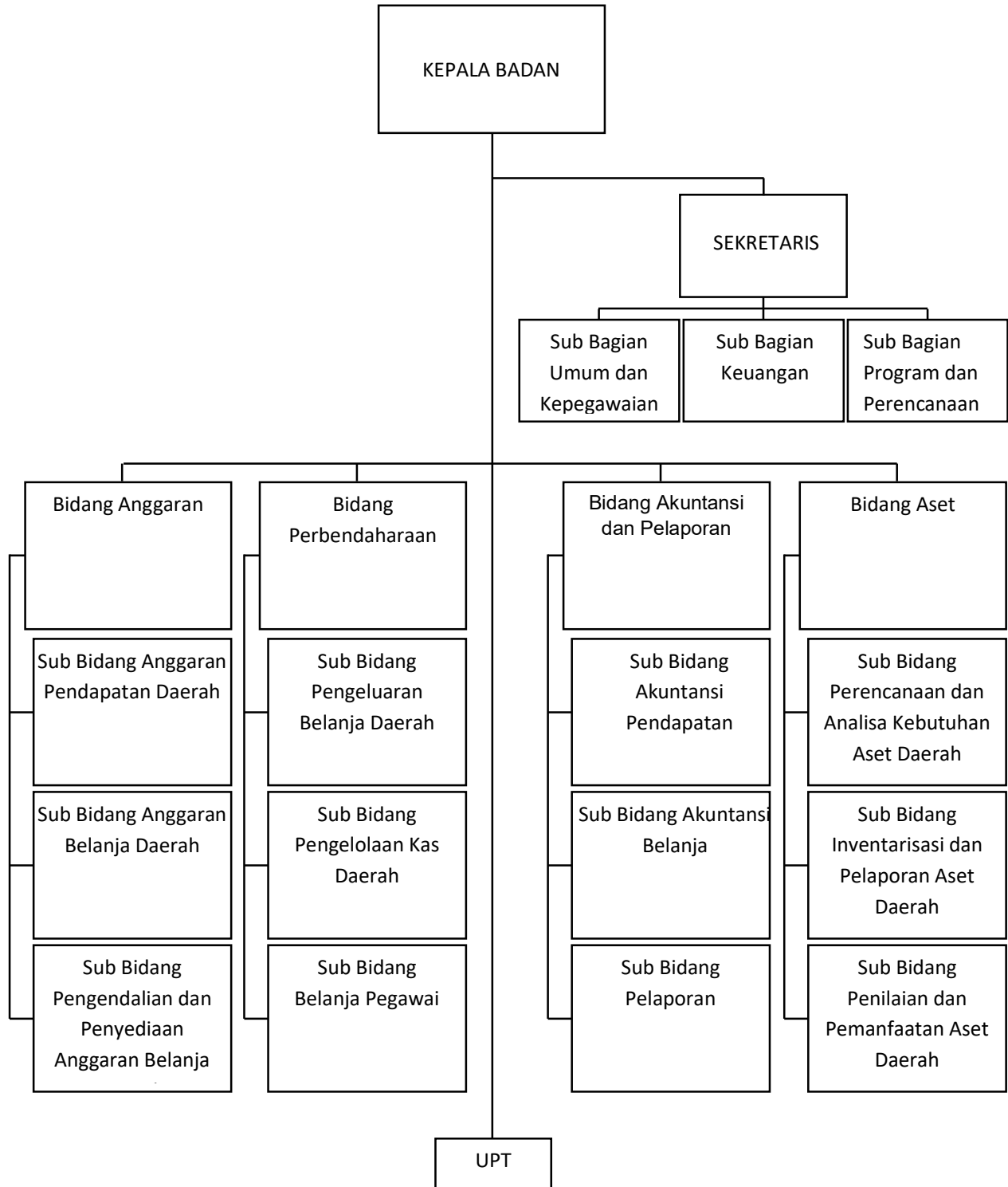
Kepala Bidang Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah lingkup perencanaan dan analisa kebutuhan aset daerah, inventarisasi dan pelaporan aset daerah, penilaian dan pemanfaatan aset daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam mempunyai Fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program lingkup perencanaan dan analisa kebutuhan aset daerah, inventarisasi dan pelaporan aset daerah, penilaian dan pemanfaatan aset daerah
- b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup perencanaan dan analisa kebutuhan aset daerah, inventarisasi dan pelaporan aset daerah, penilaian dan pemanfaatan aset daerah.
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi serta urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan dan analisa kebutuhan aset daerah, inventarisasi dan pelaporan aset daerah, penilaian dan pemanfaatan aset daerah
- d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup perencanaan dan analisa kebutuhan aset daerah, inventarisasi dan pelaporan aset daerah, penilaian dan pemanfaatan aset daerah.

Gambar 2.1.1

**STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BATAM**



## **2.2. Sumber Daya**

### **2.2.1. Sumber daya Manusia**

Dalam menjalankan tugas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam didukung oleh sumber daya manusia (Bagian Keuangan) yang berjumlah 73 orang dengan rincian Pegawai Negeri Sipil berjumlah 56 orang, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil berjumlah 17 orang.

Latar belakang pendidikan, tingkat pendidikan, pangkat dan golongan Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut :

1. Sarjana S2 : 9 orang
2. Sarjana S1/D4 : 33 orang
3. Diploma 3/D3 : 6 orang
4. SMU/Sederajat : 8 orang

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam menurut Pangkat dan Golongan :

1. Pengatur Muda II/a : 1 orang
2. Pengatur Muda Tk.I II/b : 5 orang
3. Pengatur II/c : 3 orang
4. Pengatur Tk.I II/d : 3 orang
5. Penata Muda III/a : 9 orang
6. Penata Muda Tk.I III/b : 15 orang
7. Penata III/c : 8 orang
8. Penata Tk.I III/d : 7 orang
9. Pembina IV/a : 3 orang
10. Pembina Tk.I IV/b : 2 orang

Jumlah Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam menurut Jabatan Struktural/Eselonering :

1. Eselon II : 1 Orang
2. Eselon III/a : 1 Orang
3. Eselon III/b : 4 Orang
4. Eselon IV/a : 16 Orang
5. Eselon IV/b : 1 Orang

## 2.2.2. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam ditunjang dengan tersedianya sebuah gedung kantor dan perlengkapan kantor lainnya (Bagian Keuangan) dapat dilihat pada tabel 2.2.2.1 sebagai berikut:

**Tabel 2.2.2.1.**  
Sarana dan Prasana BPKAD (Bagian Keuangan)

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI			KET
			Baik	Sedang	Rusak	
1	2	3	4	5	6	7
1	Kendaraan Roda Empat	2	Baik			
2	Komputer	30	Baik			
3	Laptop	5	Baik			
4	Printer	32	Baik			
5	TV	3	Baik			
6	AC	9	Baik			
7	Meja Kerja	33	Baik			
8	Kursi Kerja	35	Baik			
9	Brand Kas	7	Baik			
10	Dispenser	3	Baik			
11	Filing	6	Baik			
12	Rak kayu	3	Baik			
13	Lemari Kaca	2	Baik			
14	Lemari Arsip	1	Baik			
15	Lemari File / Lemari Arsip	7	Baik			
16	Lemari Besi	2	Baik			
17	Lemari Es	2	Baik			
18	Telepon	2	Baik			
19	Mesin Foto Copy	1	Baik			
20	Gorden	4	Baik			

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI			KET
			Baik	Sedang	Rusak	
1	2	3	4	5	6	7
21	Karpet	1	Baik			
22	Sofa	2 set	Baik			
23	Meja Sofa	2 set	Baik			
24	Proyektor	3	Baik			
25	Ic Recorder	1	Baik			
26	Scanner	2	Baik			
27	Penghancur Kertas	7	Baik			
28	Kamera Digital	1	Baik			
29	UPS	10	Baik			
30	Meja Kaca	2	Baik			
31	Server	2	Baik			
32	Alat Pemadam	2	Baik			
33	Speddy	2	Baik			
34	CCTV	3	Baik			
35	Mesin Hitung Uang	2	Baik			
36	Jam Dinding	2	Baik			

### 2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam merupakan penggabungan dari Bagian Keuangan dan Bagian Perlengkapan dan Aset. Sekretariat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) yang menjalankan fungsi-fungsi Koordinasi, Sinkronisasi serta Fasilitasi dalam pelaksanaan Kebijakan Daerah. Fungsi-fungsi tersebut dijalankan melalui :

1. Penyusunan Kebijakan;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan;
3. pengawasan pelaksanaan kebijakan;
4. Pembinaan administratif dan aparatur.



Pengukuran kinerja pelayanan pada Sekretariat Daerah dapat ditinjau dari 2 (dua) dimensi, yaitu dimensi pelaksanaan tugas, fungsi, serta kewenangannya dan dimensi keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakannya. Pengukuran kinerja dari dimensi pelaksanaan tugas dan fungsi dapat dinilai dari sejauhmana suatu organisasi berperan dalam melaksanakan fungsi-fungsinya serta pelaksanaan administrasi perkantoran secara umum.

Pada dimensi lain, pengukuran kinerja dinilai dari kemampuan suatu organisasi dalam melaksanakan program-program dan kegiatan yang telah direncanakannya. Penilaian tersebut dilakukan dengan mengukur capaian indikator yang telah ditetapkan dalam perencanaan, yaitu nilai keluaran (**Output**), Hasil (**Outcome**), Manfaat (**Benefit**), serta Dampak (**Impact**) yang baru bisa diukur keberhasilannya dalam jangka panjang.

### **2.3.1 Capaian kinerja pada dimensi pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Pengukuran kinerja Bagian Keuangan dan Bagian Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah dari aspek tingkat capaian kinerja adalah kemampuan Sekretariat Daerah dalam melaksanakan program-program jangka menengah (Renstra 5 tahunan) yang telah ditetapkan. Penilaian ini mencakup capaian target Program dan kegiatan dari besaran masukan (*Input*), Keluaran (*Output*), Hasil (*Outcome*), Manfaat (*Benefit*), Dampak (*Impact*) dari suatu Program Kegiatan.

Sebagaimana yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Batam 2016-2021. Mengacu pada RPJMD Kota Batam tahun 2011-2016. Sekretariat Daerah melaksanakan Misi I RPJM 2016-2021 Kota Batam yaitu "***Mewujudkan Tata Laksana Pemerintah Yang Baik (Good Governance)***".

Untuk mencapai Misi tersebut, Bagian Keuangan dan Bagian Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah melaksanakan 4 (empat) Program dan 28 Kegiatan. Pelaksanaan Kegiatan tersebut meliputi beberapa aspek penyelenggaraan Pemerintah diantaranya Sumberdaya Aparatur, Sarana dan Prasarana Perkantoran, Pengelolaan Keuangan Daerah, Penatan organisasi dan ketatalaksanaan serta Penyelenggaraan administrasi Pemerintahan. Pengukuran kinerja Sekretariat Daerah khususnya Bagian Keuangan dan

Bagian Aset Sekretariat Daerah Kota Batam pada lima tahunan terakhir (2011-2016) dapat diuraikan sebagaimana yang terlihat pada table 2.3.1.1 sebagai berikut :

**Tabel 2.3.1.1**  
**Reviu Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Kegiatan**  
**Bagian Keuangan dan Bagian Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah Kota Batam**  
**(kondisi akhir Renstra 2011-2016)**

URUSAN/BIDANG DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Capaian Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Persentase Capaian (%)	OPD Penanggung Jawab
		target	Rp.	target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN							
Pembangunan, peningkatan dan pengadaan fasilitas sarana dan prasarana perkantoran Pemerintah							
Koordinasi dan Sinkronisasi Status Aset Daerah Kota Batam	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi status Aset Daerah Pemerintah Kota Batam	1 Tahun 100%	3,596,177,516	1 Tahun 100%	3,601,285,000	Setiap tahun 100%	Bagian Perlengkapan dan Aset
Pengamanan Aset Daerah Kota Batam	Terlaksananya Pengamanan aset bangunan dan persil milik Pemerintah Kota Batam	65 Persil dan 1 Pentas, 4 Pagar Kantor	9,252,807,669	65 Persil dan 1 Pentas, 4 Pagar Kantor	10,053,867,500	91 % Persil dan 1 Pentas, 54 %Pagar Kantor	Bagian Perlengkapan dan Aset

URUSAN/BIDANG DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Capaian Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Persentase Capaian (%)	OPD Penanggung Jawab
		target	Rp.	target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Pemanfaatan, penilaian, dan Pemindahtanganan Aset Pemerintah Kota Batam	Terlaksananya pemindahtanganan Aset Pemerintah Kota Batam	1 Tahun 100%	6,078,194,375	1 Tahun 100%	5,026,979,600	Setiap tahun 100%	Bagian Perlengkapan dan Aset
Asistensi Penatausahaan Laporan Aset Daerah Pemerintah Kota Batam	Terlaksananya Perekaman Data, Pengolahan Data, dan Penyajian Data Aset Pemerintah Kota Batam 12 bulan	1 Tahun 100%	5,806,057,036	1 Tahun 100%	3,864,326,750	Setiap tahun 100%	Bagian Perlengkapan dan Aset
Pelaksanaan Sensus Barang Daerah Kota Batam	Terlaksananya Sensus Barang Daerah		550,000,000		650,000,000	Setiap tahun 100%	Bagian Perlengkapan dan Aset
Peningkatan Kualitas Sumber daya Aparatur							
Workshop Akuntansi Keuangan Daerah	Terlaksananya Workshop /Bimtek akuntansi Keuangan aparatur dilingkungan Pemerintah Kota Batam	750 Orang selama 5 tahun	2,348,393,281	750 Orang selama 5 tahun	1,911,180,700	Setiap tahun 100%	Bagian Keuangan
Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan bagi Aparatur pengelola keuangan Pemerintah	100 orang bimtek penyusunan anggaran, 100 orang bimtek penatausahaan	3,073,908,664	100 orang bimtek penyusunan anggaran, 100 orang bimtek penatausahaan keuangan, 100 orang	3,174,260,700	100%	Bagian Keuangan

URUSAN/BIDANG DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Capaian Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Persentase Capaian (%)	OPD Penanggung Jawab
		target	Rp.	target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kota Batam	keuangan, 100 orang bimtek penatausahaan belanja pegawai		bimtek penatausahaan belanja pegawai			
Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan							
Penyusunan Standarisasi Harga Barang/Jasa	Tersusunnya Standar Harga Barang/Jasa pemerintah Kota Batam	10 kali perubahan SHB dalam 5 tahun	2,354,583,156	10 kali perubahan SHB dalam 5 tahun	2,577,322,846	100%	Bagian Perlengkapan dan Aset
Bimtek dan Orientasi Pengelola Barang Daerah	Terlaksananya Bimtek dan Orientasi Pengelola Barang Daerah	740 orang dalam 5 tahun	1,536,425,000	740 orang dalam 5 tahun	1,276,191,154	98%	Bagian Perlengkapan dan Aset
Peningkatan, pembinaan, dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah							
Penyusunan APBD Kota Batam	Tersusunnya Buku APBD Pemerintah Kota Batam	1. Buku Perda APBD dan APBD-P, 2. Buku Perwako Penjabaran APBD dan APBD-P, 3. Buku DPA OPD APBD-APBD-P setiap tahun	3,595,804,536	1. Buku Perda APBD dan APBD-P, 2. Buku Perwako Penjabaran APBD dan APBD-P, 3. Buku DPA OPD APBD-APBD-P setiap tahun	3,418,226,500	100%	Bagian Keuangan

URUSAN/BIDANG DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Capaian Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Persentase Capaian (%)	OPD Penanggung Jawab
		target	Rp.	target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batam	Tersedianya Buku Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batam	1 Laporan Keuangan Bulanan, 4 Buku Laporan Triwulan, 2 Buku Laporan Semester	3,041,860,003	1 Laporan Keuangan Bulanan, 4 Buku Laporan Triwulan, 2 Buku Laporan Semester	2,694,642,600	100%	Bagian Keuangan
Penyusunan Laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersedianya Buku Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1. buku Perda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, 2. Buku Perwako Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2,628,266,504	1. buku Perda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, 2. Buku Perwako Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2,155,425,600	100%	Bagian Keuangan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Batam	Tersedianya Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Batam (LKPJ-AMJ)	1 Dok Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Batam (LKPJ-AMJ)	2,353,228,209	1 Dok Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Batam (LKPJ-AMJ)	1,385,135,700	100%	Bagian Keuangan
Penyusunan Perubahan APBD Kota Batam	Tersusunnya Buku APBD Perubahan Pemerintah Kota Batam	1. Buku Perda APBD-P, 2. Buku Perwako Penjabaran APBD-P, 3. Buku DPA OPD	4,010,779,443	1. Buku Perda APBD-P, 2. Buku Perwako Penjabaran APBD-P, 3. Buku DPA OPD	3,113,175,000	100%	Bagian Keuangan

URUSAN/BIDANG DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Capaian Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Persentase Capaian (%)	OPD Penanggung Jawab
		target	Rp.	target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terpenuhinya Jasa administrasi Keuangan	Terlaksananya Pelayanan Operasional Jasa Administrasi Keuangan 1 Tahun 100%	2,765,716,581	Terlaksananya Pelayanan Operasional Jasa Administrasi Keuangan 1 Tahun 100%	4,070,422,200	100%	Bagian Keuangan
Koordinasi , Evaluasi dan Sinkronisasi Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil	Terlaksananya Koordinasi , Evaluasi dan Sinkronisasi Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil	Buku PMK Dana Transfer 100 Buku, Laporan Dana DAK 200 Buku	3,399,644,627	Buku PMK Dana Transfer 100 Buku, Laporan Dana DAK 200 Buku	1,837,111,900	100%	Bagian Keuangan
Asistensi Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Batam	Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batam sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	1. Buku Laporan Pendahuluan 2. buku, laporan antara 3. buku, laporan akhir	3,134,193,301	1. Buku Laporan Pendahuluan 2. buku, laporan antara 3. buku, laporan akhir	1,824,009,500	100%	Bagian Keuangan
Pengelolaan penggajian PNS Pemerintah Kota Batam	Peningkatan Kualitas pelayanan dibidang Penggajian Aparatur Pemerintah Kota Batam	Buku Laporan Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS	2,767,374,271	Buku Laporan Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS	1,676,722,500	100%	Bagian Keuangan

URUSAN/BIDANG DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Capaian Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Persentase Capaian (%)	OPD Penanggung Jawab
		target	Rp.	target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Pengembangan dan Pemeliharaan Sitem Komputerisasi Pengelolaan Keuangan Daerah PPKD dan OPD	Terpeliharanya SIM Keuangan Daerah PPK dan OPD	5 Aplikasi	3,374,226,723	5 Aplikasi	2,488,000,000	100%	Bagian Keuangan
Penyempurnaan Sitem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersedianya buku sitem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	150 buku setiap tahun selama 5 tahun	1,813,916,106	150 buku setiap tahun selama 5 tahun	1,843,249,000	100%	Bagian Keuangan
Implementasi Sitem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Kota Batam	Terlaksananya Penerapan SIPKD	Terlaksananya Penerapan SIPKD	2,050,000,000	Terlaksananya Penerapan SIPKD	2,901,840,700	100%	Bagian Keuangan
Kajian Akademik Sitem Penyusunan Anggaran	Tersedianya Kajian Akademik Sitem Penyusunan Anggaran	1 Naskah Kajian Akademik	375,200,000	1 Naskah Kajian Akademik	350,000,000	100%	Bagian Keuangan
Penyusunan Laporan keuangan Trial berbasis AKRUAL	Terlaksananya uji coba Laporan Keuangan Berbasis AKRUAL	1 Laporan Trial berbasis AKRUAL	400,000,000	1 Laporan Trial berbasis AKRUAL	365,000,000	100%	Bagian Keuangan
Sosialisasi Peraturan Pengeloan Keuangan Darah	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah	150 Orang dalam 5 tahun	717,500,000	150 Orang dalam 5 tahun	557,000,000	100%	Bagian Keuangan



URUSAN/BIDANG DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Capaian Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Persentase Capaian (%)	OPD Penanggung Jawab
		target	Rp.	target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Peningkatan dan Pengembangan sistim komputerisasi Aktiva Tetap	Terpeliharanya Sistem aplikasi Aktiva Tetap	1 aplikasi	150,210,000	1 aplikasi	165,000,000	100%	Bagian Keuangan
Revisi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Batam	Terlaksananya perubahan peraturan kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Batam	1 Draf Revisi	500,000,000	1 Draf Revisi	450,000,000	100%	Bagian Keuangan
Peningkatan dan Pengembangan sistim komputerisasi Keuangan Daerah PPKD	Terpeliharanya Sistem Komputerisasi Keuangan Daerah PPKD	1 aplikasi	650,000,000	1 aplikasi	600,000,000	100%	Bagian Keuangan
Penyusunan Perda Pengelolaan Keuangan	Tersusunnya Ranperda Keuangan Daerah	200 Buku	300,000,000	200 Buku	275,000,000	100%	Bagian Keuangan

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD**

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Tahapan-tahapan dalam pengelolaan keuangan daerah sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya untuk mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Untuk meningkatkan kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam terdapat tantangan dan peluang yang dihadapi untuk mewujudkan pelayanan OPD yang lebih baik. Adapun Tantangan dan peluang tersebut adalah sebagai berikut :

Tantangan dalam pengembangan pelayanan OPD sebagai berikut :

1. Kinerja Laporan Keuangan yang perlu dipertahankan untuk mencapai opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang WTP;
2. Kinerja Penganggaran yang masih perlu ditingkatkan baik dari segi ketepatan waktu, ketepatan alokasi dan ketepatan dana;
3. Kinerja Perbendaharaan yang perlu ditingkatkan melayani proses pencairan baik dari OPD maupun masyarakat;
4. Kinerja Pengelolaan aset perlu ditingkatkan baik dari perencanaan kebutuhan, penatausahaan, pemanfaatan penilaian dan pemindahan aset barang milik daerah;
5. Menyediakan pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berbasis teknologi;
6. Penyelamatan arsip OPD sebagai bukti otentik pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD;
7. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam menyalurkan dana bergulir.

Peluang dalam pengembangan pelayanan OPD adalah sebagai berikut :

1. Adanya peraturan-perundangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2. Adanya Komitmen dari Kepala Daerah untuk meningkatkan pelayanan dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah serta penggunaan teknologi informasi.
3. Dukungan dan koordinasi antar pelaksana administrasi keuangan daerah, propinsi dan pusat.

## BAB III

### ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang menjalankan tugas mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan kewenangannya, tentunya menghadapi berbagai permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat diformulasikan sebagai berikut :

##### 3.1.1. Organisasi dan Ketatalaksanaan

Organisasi dan ketatalaksanaan adalah aspek terpenting dalam pengelolaan tugas dan fungsi suatu organisasi (*Business Procces*). Berkaitan dengan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi yang menjadi tanggungjawab Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Permasalahan yang teridentifikasi selama ini adalah belum optimalnya koordinasi antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Bagian Keuangan dan Bagian Aset Sekretariat Daerah) dengan Dinas dan Lembaga Teknis Daerah lainnya, terutama dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan laporan keuangan dan aset.

Pada setiap periode yang ditetapkan, selalu terjadi keterlambatan bahkan masih terdapat OPD yang tidak menyampaikan laporan aset. Sehingga dukungan data dan informasi yang diperlukan tidak memberikan kontribusi yang optimal dalam penyusunan kebijakan dan laporan.

Secara umum, Pemerintah Kota Batam telah menyusun berbagai standar, sistem, prosedur, serta pedoman pelaksanaan berbagai urusan birokrasi. Namun

pada pelaksanaannya belum secara optimal yang disebabkan oleh masih berubahnya beberapa peraturan.

### **3.1.2. Sumberdaya Manusia Aparatur**

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam. Mengacu pada beban tugas dan rentang kendali, diperlukan sumberdaya aparatur yang yang berintegritas, capable, profesional serta berkinerja tinggi. Sehingga dalam pengembangan sumberdaya aparatur kedepan memerlukan adanya suatu standar yang mengatur kompetensi aparatur agar mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan maksimal.

Dalam perencanaan pengembangan sumberdaya aparatur, belum didukung oleh keberadaan dokumen analisa jabatan, standar kompetensi serta analisis beban kerja. Belum adanya dokumen standar tersebut berdampak padatidak optimalnya upaya pengembangan Sumberdaya aparatur. Kekuatan dan kelemahan dibidang sumberdaya aparatur tidak dapat tergambarkan secara jelas.

Berdasarkan kondisi yang ada pada saat ini, jumlah aparatur pada tingkat pelaksanaan teknis (staf) pada beberapa bagian dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Bagian Keuangan dan Bagian Aset Sekretariat Daerah) belum memenuhi standar kebutuhan ideal.

Belum tercapainya jumlah aparatur yang proporsional sesuai dengan analisis beban kerja, memberi kontribusi terhadap peningkatan beban kerja pada bidang/sub bidang yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat diukur melalui aspek 1) pelaksanaan administrasi perkantoran secara umum terkait tugas pokok dan fungsi serta 2) pelaksanaan teknis kegiatan pada setiap tahunnya yang dapat diukur dari pagu anggaran serta jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun.

### **3.1.3 Sarana Prasarana**

Berdasarkan data sarana dan prasarana inventaris perkantoran yang disampaikan pada bab sebelumnya, secara umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai namun masih perlu dilakukan modernisasi pada sarana dan prasarana perkantoran yang ada. Adanya tuntutan publik akan pelayanan birokrasi yang cepat serta penguatan peran IT dalam penyelenggaraan pemerintahan (e-Government), menjadi suatu keharusan bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan masyarakat maupun penunjang administrasi perkantoran.

Selain peningkatan kualitas sarana dan prasarana, optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana juga harus dilakukan. Pemeliharaan terhadap sumberdaya sarana dan prasarana tetap harus dilakukan sesuai dengan umur ekonomis dan manfaatnya.

### **3.1.4 Pelayanan Publik**

Berdasarkan lingkup pelayanan yang dilaksanakan Sekretariat Daerah, pelayanan dilakukan terhadap aparatur dilingkungan Pemerintah Kota Batam (Internal) serta pelayanan kepada masyarakat (Eksternal). Dalam implementasinya, pelayanan dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

1. Pelayanan langsung, yakni pelayanan yang dilaksanakan secara bertatap muka baik kepada OPD Pemerintah Kota Batam, Pejabat/Tamu Pemerintah Kota Batam, maupun kepada masyarakat umum.
2. Pelayanan tidak langsung, yakni pelayanan yang dilakukan melalui suatu media seperti layanan konsultasi publik melalui Web Pemko Batam serta media cetak dan elektronik.

Dari aspek pelayanan langsung di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Bagian Keuangan dan Bagian Aset Sekretariat Daerah), permasalahan yang ditemui selama ini adalah belum terorganisirnya pelayanan kunjungan publik. Sebagai pusat penyelenggaraan birokrasi Pemerintah Kota Batam, kunjungan publik cukup tinggi pada setiap harinya. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan pengaturan yang lebih tertib agar proses pemberian pelayanan dapat dilakukan dengan tepat.

Untuk pelaksanaan pelayanan tidak langsung melalui media, perlu dilakukan optimalisasi pelayanan informasi publik yang dilakukan dengan peningkatan kualitas sumberdaya aparatur, peningkatan struktur dan infrastruktur, sistim dan prosedur, komunikasi organisasi, serta manajemen komunikasi krisis. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 31 tahun 2011 Tentang pedoman umum infrastruktur hubungan masyarakat dilingkungan Pemerintah. Diamanatkan bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan publik, informasi yang disampaikan harus mencakup beberapa aspek yaitu aspek regulatif, edukatif, transparan, jelas dan kredibel.

Berdasarkan hal tersebut dalam pelayanan informasi publik kedepan, perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber data dan informasi kehumasan yang bersumber dari pengolahan data statistik pada bidang-bidang yang ada sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.

### **3.1.5 Pola pikir (*Mindset*) dan Budaya Kerja (*Culture Set*)**

Semakin tingginya tingkat kebutuhan publik akan pelayanan pemerintah. Menuntut sumberdaya aparatur untuk meningkatkan kinerja secara individual dan kelompok (*team work*). Selain itu, meningkatnya kebutuhan pelayanan publik memberikan tekanan agar sumberdaya aparatur untuk meningkatkan kompetensinya dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya (*capacity*).

Pola struktural yang diterapkan dalam pelaksanaan fungsi-fungsi organisasi secara tidak langsung membentuk paradigma tanggung jawab struktural pula, dimana dalam pelaksanaan tugas tanggung jawab dibebankan kepada Pejabat pada eselon tertentu.

Setiap sumberdaya yang ada dalam organisasi memiliki kemampuan sesuai dengan keilmuan dan keahliannya. Potensi yang dimiliki aparatur selama ini terikat pola struktural yang ada, dimana keahlian seseorang tidak teraplikasikan secara optimal karena tidak berada dalam tanggung jawab struktural (staf) dan optimalnya pendistribusian pekerjaan berdasarkan keahlian.

Paradigma lama seperti ini selayaknya dilakukan perubahan cara berpikir (*mindset*) pada ditingkat pelaksana (staf) maupun pimpinan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi harus terdistribusi dengan baik dan tidak mengabaikan potensi sumberdaya sekecil apapun dalam organisasi. Dalam teknis pelaksanaan tugas dan fungsi harus dilakukan perubahan mendasar dari pola individual struktural kepada team work fungsional dimana semua unsur dalam organisasi terlibat dan berkontribusi sesuai dengan keahliannya masing-masing.

Apabila perubahan mindset ini terbentuk, maka secara bertahap akan membawa perubahan terhadap budaya kerja (*culture set*). Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dilakukan secara bersama-sama, lebih terbuka (*transparency*), efektif, serta mampu membangun jaringan kerja yang lebih luas (*network*).

Dengan terbangunnya budaya kerja yang baik akan berdampak pada peningkatan kemampuan kerja (kapasitas) suatu organisasi yang berdampak pada kinerja birokrasi. Dari beberapa uraian diatas, dapat dirangkum berbagai permasalahan yang teridentifikasi berkaitan dengan pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Bagian Keuangan dan Bagian Aset Sekretariat Daerah) dapat diuraikan pada tabel 3.1.5.1 sebagai berikut :



**Tabel 3.1.5.1**  
**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD**  
**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam**

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sumberdaya Manusia Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya pendistribusian Beban Kerja pada setiap jenjang;</li> <li>2. Masih Rendahnya Kemampuan Teknis Pelaksanaan Kegiatan;</li> <li>3. Tingkat Kedisiplinan Cukup Baik;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis Beban Kerja;</li> <li>2. Standar Kompetensi Jabatan;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum tersusunnya Standar Kopetensi Jabatan;</li> <li>2. Belum tersusunnya analisa beban kerja;</li> <li>3. Belum optimalnya pendistribusian kerja (bagi habis)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tuntutan Pelayanan Prima kepada Masyarakat;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya Capaian Hasil Pekerjaan;</li> <li>2. Rendahnya Kualitas Koordinasi;</li> <li>3. Pendistribusian Pekerjaan yang tidak merata</li> </ol>
Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana dan Prasarana yg perlu dilakukan modernisasi;</li> <li>2. Belum optimalnya pemanfaatan Sarana dan Prasarana Teknologi;</li> <li>3. Belum adanya standar pelayanan minimal sarana/prasarana perkantoran</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis Beban Kerja;</li> <li>2. Pelaksanaan E-Government</li> <li>3. ASB</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya pengelolaan barang inventaris Kantor;</li> <li>2. Belum adanya analisis efisiensi pembiayaan perawatan barang inventaris;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cepatnya perubahan Teknologi;</li> <li>2. Tuntutan Pelayanan Bebas IT;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak Optimalnya pemanfaatan Sarana-Prasarana Perkantoran dalam menunjang pelayanan;</li> <li>2. Pola Pelayanan yang tidak efisien;</li> </ol>
Organisasi dan ketatalaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum dilaksanakan harmonisasi Tugas Pokok dan fungsi terhadap beban kerja;</li> <li>2. Belum optimalnya penyusunan Standar, sistim dan prosedur dalam mengadopsi ketentuan peraturan;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP;</li> <li>2. Juklak dan Juknis;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum terukurnya kinerja penerapan SOP;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Belum adanya SPM dibidang Kesekretariatan;</li> <li>3. Peraturan yang cepat berubah-ubah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak terukurnya Kinerja Organisasi dengan Indikator yang jelas;</li> <li>2. Belum pernah dilakukannya pengukuran kinerja</li> </ol>

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	3. Belum terlaksananya pengukuran kinerja OPD				3. Belum terlaksananya Tugas dan Fungsi sesuai Sistem Prosedur
Pelayanan OPD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya daya dukung Data Statistik dalam pelayanan Informasi Publik;</li> <li>2. Belum terkelolanya dengan baik urusan protokoler tamu daerah, dan publik;</li> <li>3. Belum terintegrasinya pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat dalam satu kesatuan system Informasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP;</li> <li>2. SPM;</li> </ol>	1. Belum terlaksananya Pengukuran Penerapan SOP/SPM		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum terukurnya Kinerja Pelayanan dengan indikator yg jelas;</li> <li>2. Pola pelayanan parsial tidak terintegrasi;</li> </ol>
Pola pikir ( <i>mindset</i> ) dan Budaya Kerja ( <i>Culture Set</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengukuran Kinerja hanya dilihat dari tingkat kedisiplinan jam kerja;</li> <li>2. Pola Kerja Individual-Struktural;</li> <li>3. Belum berjalannya pola kerja yang berlandaskan leader ship dan Teamwork;</li> </ol>	1. Penerapan dan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	1. Belum berjalannya merit system		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya kualitas integritas pelayanan;</li> <li>2. Belum terbangunnya pola Kerjasama yg baik.</li> </ol>

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, Program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 2016-2021

Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah maka disusunlah Visi Kota Batam Tahun 2016-2021. Adapun Visi yang tersebut adalah :

***"Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Bermartabat"***

Penjabaran visi di atas adalah sebagai berikut :

**Batam** : Meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Batam dan seluruh warga-nya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batastertentu yang berkembang sejak 1970 hingga sekarang.

**Bandar Dunia** : Mengarahkan pengembangan dan pembangunan Kota Batam sebagai kota industri, perdagangan, pariwisata dan alih kapal yang kompetitif dan dinamis di kawasan regional AsiaTenggara, serta atraktif bagi pelaku bisnis dalam dan luar negeri. Dalam jangka panjang, Kota Batam diupayakan menjadi suatu kota jasa yang menjadi "*center of excellent*", dengan melakukan pendalaman pada fungsi-fungsi yang sudah ada yang ramah lingkungan dengan sentuhan teknologi yang terus berkembang.

**Madani** : Mengarahkan masyarakat Kota Batam ke dalam bentuk masyarakat yang sopan, santun, disiplin dan beradab serta berbudaya tinggi (*civilized*). Tataan masyarakat terwujud dalam sopan santun dan beradab dalam mencari jalan keluar melalui musyawarah dalam menghadapi berbagai permasalahan.

**Berdaya Saing** : Mengarahkan masyarakat Kota Batam untuk mampu melihat peluang dengan memanfaatkan keunggulan komparatif secara efektif dan mampu menciptakan keunggulan kompetitif sehingga dapat bersaing secara sehat dengan lingkungan lokal, regional dan internasional.

**Maju** : Adalah sikap dan kondisi masyarakat yang produktif, berdaya saing dan mandiri, terampil dan inovatif dengan tetap dapat menjaga tatanan sosial masyarakat yang

toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan namun tetap berpegang pada nilai budaya serta kearifan lokal dan berdaulat secara pangan, ketahanan ekonomi dan sosial.

**Sejahtera** : Bermakna kondisi yang utuh menyangkut lahir dan batin. Kesejahteraan lahir meliputi kondisi yang lebih baik pada tingkat pendidikan, kesehatan dan pendapatan penduduk. Kesejahteraan batin meliputi rasa aman, merdeka dan mampu mengaktualisasikan seluruh potensi yang dimiliki. Kondisi kesejahteraan yang lebih baik akan memberikan peluang lebih besar pada kesejahteraan pada tingkat yang lebih tinggi dan kesejahteraan antar generasi.

**Bermartabat** : Mengarahkan masyarakat Kota Batam ke dalam kondisi masyarakat yang memiliki harga diri, jati diri dan menjadikan Kota Batam sebagai kebanggaan bagi seluruh warganya, serta memiliki aparatur pemerintahan yang bersih melalui pelayanan prima tanpa membedakan status.

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi yang telah diuraikan di atas, akan ditempuh melalui enam misi pembangunan daerah sebagai berikut:

**Misi Pertama** : *Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, akuntabel, dan mengayomi.* Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan birokrasi pemerintah Kota Batam yang prima, dimana pelayanan yang diberikan harus dapat melebihi standar pelayanan yang sudah ada. Dimana kondisi demikian menuntut setiap individu dari birokrat harus akuntabel, yakni bekerja sesuai prosedur, memiliki integritas dan tanggungjawab dalam melakukan setiap pekerjaan, serta tidak membedakan status dari warga-nya. Selain itu sifat transparan harus melekat dalam sistem birokrasi, dimana seluruh penyelenggara pemerintahan daerah harus membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak

diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

**Misi Kedua :** *Mewujudkan SDM Daerah yang bertaqwa, berdayasaing dan masyarakat yang sejahtera.* Misi ini dimaksudkan untuk menciptakan manusia Kota Batam yang agamis, berakhlak mulia, bermoral, sehat, cerdas, siap bersinergi dan berkompetisi di dalam konstelasi Masyarakat Ekonomi Asean. Sehingga tercipta kehidupan kota dengan masyarakat yang lebih mandiri dan berbudaya.

**Misi Ketiga :** *Mewujudkan tata ruang kota yang berwawasan lingkungan, infrastruktur kota yang modern, serta penataan permukiman yang ramah, asri dan nyaman sesuai nilai budaya bangsa.* Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pembangunan infrastruktur yang berkualitas dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan sesuai dengan tata ruang Kota Batam, sehingga tercipta kenyamanan bagi seluruh entitas masyarakat yang berada di Kota Batam.

**Misi Keempat :** *Mewujudkan penguatan sektor industri dan peningkatan peran sektor jasa, perdagangan, pariwisata, alihkapal, maritim dan pertanian/ perikanan dalam menopang perekonomian daerah.* Misi ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pendayagunaan keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh Kota Batam, yakni wilayah yang berbentuk kepulauan, serta letak geografis yang strategis karena terletak di jalur perdagangan internasional. Oleh karena itu Pemerintah Kota Batam memberikan perhatian khusus dalam konteks jaminan iklim usaha yang kondusif, melalui penyediaan tenaga kerja terampil, kemudahan investasi dan pelayanan yang prima, serta peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi. Dalam konteks wilayah Batam sebagai kepulauan, penguatan tata kelola ekonomi wilayah pesisir dan laut dapat memberikan *value added* terhadap jasa dan produk yang dihasilkan dari pengolahan sumberdaya pesisir dan laut.

**Misi Kelima :** *Mewujudkan penguatan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM dan Koperasi yang bersinergi dengan kebutuhan industri dan pasar domestik.* Misi ini dimaksudkan untuk menciptakan konektivitas sektor UMKM dan Koperasi dengan kegiatan industri di Kota Batam, sehingga UMKM dan Koperasi memiliki akses yang lebih

luas terhadap pilihan jenis komoditas yang akan dijual, permodalan, dan kepastian dalam hal *sustainability businesses*. Hal tersebut dapat menjadi stimulus kepada warga Kota Batam untuk memulai usaha UMKM dan memanfaatkan Koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Dengan demikian, diharapkan tingkat pengangguran dapat diminimalkan seraya diiringi dengan peningkatan produktivitas masyarakat Kota Batam. Hal tersebut bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Batam.

**Misi Keenam :** *Mewujudkan percepatan pembangunan di daerah hinterland sebagai penopang dan penyangga perekonomian Kota Batam.* Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di wilayah *hinterland*, sehingga masyarakat di wilayah tersebut memiliki akses yang lebih luas dalam menjangkau informasi dan mengolah sumberdaya ekonomi. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan dasar di wilayah *hinterland* menjadi perhatian Pemerintah Kota Batam dalam konteks mendekatkan pelayanan kepada masyarakat demi terciptanya pemerataan kesejahteraan masyarakat hingga wilayah *hinterland*.

Mengacu pada Misi pembangunan RPJMD Kota Batam tahun 2016-2021. Misi yang secara spesifik menjadi tanggungjawab Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam adalah Misi 1 (satu) ***“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, akuntabel, dan mengayomi”***.

Tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang hendak dicapai dalam Misi 1 RPJMD 2016-2021 Kota Batam adalah sebagai berikut :

**Tujuan :**

Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, bersih dan transparan

**Sasaran :**

Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efektif, efisien dan berkualitas

**Indikator Kinerja :**

Nilai akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah

**Target Kinerja Sasaran :**

Opini BPK WTP.

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi**

#### **Renstra Kementerian Keuangan**

Renstra Kementerian Keuangan merupakan gambaran secara makro dari kebijakan Pemerintah Pusat dalam pengelolaan keuangan bila dilihat dari sudut pandang OPD di Pemerintahan Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam dalam menyusun Renstra 2016-2021 menyelaraskan dengan Renstra Kementerian Keuangan, sehingga dalam menyusun Renstra BPKAD Kota Batam salah satu acuan pokok yang digunakan adalah Renstra Kementerian Keuangan 2015-2019. Adapun visi, misi dan tujuan dari Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut :

#### **Visi Kementerian Keuangan**

***“Kami akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif abad ke-21”***

Dalam visi yang baru, penggerak utama berarti bahwa Kementerian Keuangan dalam perannya sebagai pengatur pengelola keuangan Negara, berperan sebagai *prime mover* dalam mendorong pembangunan nasional dimasa depan. Melalui manajemen pendapatan dan belanja Negara yang proaktif, Kementerian Keuangan menggerakkan dan mengarahkan perekonomian Negara menyongsong masa depan.

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif mengindikasikan bahwa pertumbuhan dan pembangunan yang diarahkan oleh Kementerian Keuangan akan menghasilkan dampak yang merata di seluruh Indonesia.

Menekankan abad ke-21 sebagai periode waktu menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan menyadari peran yang dapat dan harus dijalankan didunia modern, dengan menghadirkan teknologi informasi serta proses-proses yang modern guna mewujudkan peningkatan berkelanjutan.

#### **Misi Kementerian Keuangan**

1. Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat.
2. Menerapkan kebijakan fiskal yang *prudent*.
3. Mengelola neraca keuangan pusat dengan resiko minimum.
4. Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif.
5. Menarik dan mempertahankan *talent* terbaik di kelasnya dengan menawarkan proporsi nilai pegawai yang kompetitif.

**Tujuan Kementerian Keuangan pada tahun 2015-2019 adalah :**

1. Terjaganya kesinambungan fiskal.
2. Optimalisasi penerimaan Negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai.
3. Pembangunan sisten Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang handal untuk optimalisasi penerimaan Negara.
4. Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran dan transfer ke daerah.
5. Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan Negara dan pembiayaan anggaran.
6. Peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan.
7. Kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan.

**Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau**

Renstra BPKKD Provinsi Kepri menjadi salah satu acuan dan bahan pertimbangan dalam penyusunan Renstra BPKAD Kota Batam. Hal ini guna menjamin terjadinya harmonisasi dan sinkronisasi dalam pengelolaan keuangan. Adapun Visi dan Misi BPKKD Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

**Visi BPKKD Provinsi Kepulauan Riau**

***“Terwujudnya Pelayanan Prima Dalam Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Untuk Menunjang Pencapaian Visi Provinsi Kepulauan Riau”***



Pernyataan Visi BPKKD Provinsi Kepri mengandung makna bahwa penerapan otonomi daerah seutuhnya akan membawa konsekuensi logis berupa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan manajemen keuangan yang sehat. Pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang sudah menjadi tuntutan masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah juga diarahkan pada pemberian peranan besar kepada pejabat pelaksana anggaran, penciptaan system pengawasan pengeluaran dan pembayaran yang baik, manajemen kas dan perencanaan keuangan yang matang, pengelolaan piutang dan utang, pengelolaan investasi dan BUMD. Pelayanan yang prima juga mengandung maksud bahwa jasa yang dihasilkan dapat memenuhi harapan dan kebutuhan baik bagi pemberi maupun penerima pelayanan tersebut.

#### **Misi BPKKD Provinsi Kepulauan Riau**

1. Menciptakan system pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan *Up To Date*;
2. Membina profesionalisme BUMD, dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau;
3. Menciptakan manajemen aset yang transparan, akuntabel dan *Up To Date*;
4. Meningkatkan perolehan dana perimbangan.

Sehingga dapat ditarik benang merah hal-hal yang menjadi pertimbangan perumusan isu-isu strategis dalam prioritas pembangunan nasional dan daerah. Review ini penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra Kementerian Keuangan, Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Provinsi Kepri dengan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Selain identifikasi permasalahan dalam pelayanan, dalam menentukan arah kebijakan ke depan diperlukan identifikasi terhadap isu-isu strategis baik dari lingkungan internal maupun eksternal berupa permasalahan dapat mempengaruhi kinerja organisasi secara signifikan dan perlu mendapatkan prioritas penanganan dimasa mendatang.

Keberadaan Batam sebagai daerah yang memiliki posisi strategis diperbatasan internasional, telah memberikan pengaruh terhadap dinamika penyelenggaraan Pemerintahan Kota Batam. Sebagai daerah yang dianggap maju, standarisasi pelayanan diberikan seringkali disandingkan dengan keberhasilan negara-negara tetangga yang cukup dekat dengan Kota Batam.

Sebagai daerah yang memiliki core business dibidang Industri, Perdagangan dan pariwisata, pelayanan dibidang investasi merupakan aspek yang harus mampu dikendalikan dan ditata dengan baik oleh Pemerintah Kota Batam. Berkaitan dengan Visi Kota Batam, upaya untuk mewujudkan Batam sebagai daerah pertumbuhan ekonomi andalan nasional, tentunya harus mampu meningkatkan daya saing dalam memberikan kemudahan (incentive) serta pelayanan perizinan yang berkualitas bagi tumbuh kembangnya industri di Kota Batam. Upaya tersebut dapat berhasil bila dibarengi dengan upaya meningkatkan kinerja birokrasi. Dari lingkup eksternal, berdasarkan dinamika yang berkembang saat ini, telah teridentifikasi isu-isu strategis yang dijabarkan pada tabel 3.4.1 sebagai berikut :

**Tabel 3.4.1**  
Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		Road Map Reformasi Birokrasi yang mencakup 7 (tujuh) area perubahan yaitu  1. Organisasi dan tata laksana 2. Peraturan Perundangan 3. Sumber Daya Aparatur 4. Pengawasan 5. Akuntabilitas 6. Pelayanan Publik	1. Peningkatan Kinerja Birokrasi; 2. Peningkatan Pengawasan Akuntabilitas 3. Tingginya ekspektasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan pemanfaatan ICT	

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		7. Perubahan Mindset-Culture set.		
2	Peningkatan daya saing (kompetitif) Pemerintahan antar negara	Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah	1. Penataan Perangkat Daerah 2. Penyusunan Penempatan Jabatan Struktural sesuai Kopetensi	
3		Pelaksanaan Inpres Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1. Persepsi Indeks Korupsi 2. Pembentukan TP4D	

### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan hasil telaahan tersebut diatas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Batam menetapkan beberapa isu strategis yang perlu ditangani dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Batam, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2. Perlunya peningkatan koordinasi dalam penyusunan anggaran agar tepat waktu, tertib dan transparan.
3. Perlunya peningkatan pelaksanaan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah di beberapa OPD.
4. Perlunya peningkatan pemahaman dan pengetahuan OPD dalam menyusun Laporan Keuangan berbasis akrual.
5. Belum optimalnya koordinasi pengelolaan barang daerah sebagai bahan penyusunan laporan keuangan.
6. Belum terintegrasinya sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah.
7. Belum adanya penataan sistem dokumen kearsipan keuangan yang merupakan suatu sistem penyelamatan arsip keuangan daerah.

8. Perlu ditingkatkan transparansi dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan ditetapkannya isu-isu strategis tersebut, maka Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam diarahkan untuk menghadapi dan mengatasinya yang tertuang dalam penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam.

**BAB IV**  
**VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

**4.1 Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam**

Dengan mempertimbangkan capaian kinerja, potensi dan permasalahan serta memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kota Batam Tahun 2016-2021 maka visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2016-2021 adalah :

***"Mewujudkan Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Yang Tertib, Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel"***

Penjabaran visi diatas adalah sebagai berikut :

**Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah** : merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan dan aset daerah.

Dengan terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah diharapkan :

1. Keuangan dan aset daerah dapat dikelola secara tertib, taat pada peraturan-perundangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat.
2. Keuangan dan aset daerah dapat dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD setiap tahun yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

**Tertib** : pada dasarnya tertib administrasi pengelolaan keuangan negara merupakan pelaksanaan pelaksanaan pengelolaan keuangan negara yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tertib administrasi keuangan negara mencakup tertib dalam pengelolaan keuangan negara dan tanggungjawab keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN/APBD sebagaimana diatur pada Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara.

**Efektif** : adalah pencapaian tujuan / target dalam batas waktu yang telah ditetapkan.

**Efisien** : adalah pencapaian target pekerjaan dengan meminimalisir sumber daya yang ada.

**Transparan** : adalah keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan dan aset daerah.

**Akuntabel** : adalah setiap pelaksanaan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk mewujudkan visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam, maka disusunlah misi yang menjadi mandat dan tanggungjawab Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan administrasi, akuntabilitas kinerja dan keuangan serta profesionalisme sumber daya aparatur.
2. Meningkatkan sistem pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang transparan dan profesional.
3. Meningkatkan layanan penatausahaan yang akuntabel.
4. Meningkatkan kualitas penyusunan dan penyajian laporan keuangan daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual.
5. Meningkatkan penataan dan pengelolaan aset daerah yang efektif dan efisien.

#### **Penjelasan Misi :**

**Misi Pertama** : *Meningkatkan pelayanan administrasi, akuntabilitas kinerja dan keuangan serta profesionalisme sumber daya aparatur.*

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan administrasi, akuntabilitas kinerja dan keuangan serta profesionalisme sumber daya aparatur guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggungjawab yang diemban oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang dilakukan oleh aparatur yang memiliki integritas, kompetensi dan kemampuan yang didukung oleh pengetahuan dan ketrampilan sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dilakukan secara efektif,

efisien serta dapat dipertanggungjawabkan.

**Misi Kedua :** *Meningkatkan sistem pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang transparan dan profesional.*

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan sistem pengelolaan APBD yang transparan serta meningkatkan akses informasi mengenai keuangan dan aset daerah dan dapat memudahkan semua pihak untuk mengawasi penggunaan dan pemanfaatan keuangan dan aset daerah dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

**Misi Ketiga :** *Meningkatkan layanan penatausahaan yang akuntabel.*

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan penatausahaan keuangan yang akuntabel serta meningkatkan pertanggungjawaban keuangan dan aset daerah.

**Misi Keempat :** *Meningkatkan kualitas penyusunan dan penyajian laporan keuangan daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual.*

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan penyusunan dan penyajian laporan keuangan daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual sehingga mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian.

**Misi Kelima :** *Meningkatkan penataan dan pengelolaan aset daerah yang efektif dan efisien.*

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan penataan dan pengelolaan aset daerah secara efektif dan efisien sehingga meningkatkan penataan dan pengelolaan aset daerah yang akuntabel, transparan, adil dan bermanfaat.

#### **4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan

ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi dan mengarah kepada suatu titik terang pencapaian hasil.

Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa mendatang. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran lebih nyata dari perumusan visi dan misi.

Tujuan jangka panjang maupun jangka pendek (satu sampai dengan lima tahun) yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam adalah sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kota Batam yaitu Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang baik, bersih, transparan dan akuntabel.

Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis fokus utama penentuan sasaran. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan organisasi dalam jangka waktu tahunan. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai. Sasaran yang ditetapkan merupakan gambaran yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan untuk 5 (lima) tahun ke depan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam dalam menetapkan sasaran berorientasi pada hasil dan dapat dicapai, berdasarkan uraian diatas dapat dijabarkan tujuan dan sasaran dari masing-masing misi sebagai berikut :

#### **Misi I**

Meningkatkan pelayanan administrasi, akuntabilitas kinerja dan keuangan serta profesionalisme sumber daya aparatur.

Tujuan :

Meningkatkan kualitas layanan administrasi perkantoran, keuangan dan sumber daya aparatur.

Sasaran :

Terwujudnya kualitas layanan administrasi kepegawaian, keuangan dan perencanaan.



**Misi II**

Meningkatkan sistem pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang transparan dan profesional.

Tujuan :

Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan professional.

Sasaran :

Terwujudnya penyusunan dan penyampaian dokumen APBD tepat waktu.

**Misi III**

Meningkatkan layanan penatausahaan yang akuntabel.

Tujuan :

Meningkatkan akuntabilitas penatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah

Sasaran :

Terwujudnya layanan penatusahaan keuangan yang tepat waktu

**Misi IV**

Meningkatkan kualitas penyusunan dan penyajian laporan keuangan daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual.

Tujuan :

Meningaktkan sistem penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual.

Sasaran :

Terwujudnya penyampaian dan pelaporan keuangan dan penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tepat waktu dan sesuai SAP berbasis akrual.

**Misi V**

Meningkatkan penataan dan pengelolaan aset daerah yang efektif dan efisien.

Tujuan :

Meningkatkan penataan dan pengelolaan aset daerah secara efisien dan efektif.

Sasaran :

Terwujudnya validitas sistem pengelolaan aset daerah.

#### **4.3 Strategi dan Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam**

Strategi menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis dan komprehensif tentang langkah-langkah/upaya-upaya yang diperlukan untuk merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka disusun strategi untuk pencapaian sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

1. Menerapkan tertibnya administrasi yang efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Menerapkan sistem penyusunan, pengendalian dan penggunaan anggaran tepat waktu dan tepat sasaran.
3. Menerapkan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Menerapkan penyelenggaraan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Meningkatkan validitas sistem pengelolaan aset daerah serta integrasi sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Berhasil tidaknya suatu rencana strategis akan sangat tergantung jelas dan tidaknya arah kebijakan yang ditetapkan. Adapun Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kelancaran pelayanan administrasi, kualitas sumber daya aparatur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Meningkatkan pengelolaan perencanaan, pelaksanaan keuangan daerah yang mendukung kebutuhan pembangunan daerah.
3. Meningkatkan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Meningkatkan pembinaan kepada OPD bersama instansi terkait dalam rangka mewujudkan Sistem Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual yang tepat waktu.
5. Meningkatkan penyelenggaraan sistem informasi pengelolaan aset daerah dan terintegrasinya sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah.

## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Perencanaan adalah suatu proses penetapan serangkaian tindakan yang akan dilakukan dimasa yang akan datang dengan mengalokasikan segala sumber daya dalam rangka mencapai tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategi konkrit untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan yang sudah ditetapkan, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam telah menyusun berbagai program dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah, dimana program tersebut mencakup kebijakan, mempertimbangkan sumber daya organisasi, terinci dan sinkron dengan fungsi organisasi. Penjabaran dari program kerja ini dalam bentuk kegiatan, yang disusun secara tahunan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, process, outputs, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Pencapaian kinerja dapat diukur dengan baik apabila terdapat satuan pengukuran yang memadai, untuk itu tentunya diperlukan suatu program aksi yang dapat menunjang organisasi dalam menilai kinerjanya. Aktifitas atau kegiatan instansi pemerintah merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang telah dibuat oleh organisasi tersebut. Aktifitas atau kegiatan ini berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Rencana kegiatan terdiri dari strategi pokok dan konkrit untuk diimplementasikan secara maksimal dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dengan memperhatikan lingkungan yang ada, baik lingkungan internal maupun eksternal.

Dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam masuk dalam Misi ke 1 dari RPJMD Kota Batam yaitu : ***Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan akuntabel dan mengayomi.***

Dari misi ke 1 RPJMD Kota Batam tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam menetapkan 3 (tiga) program SKPD sebagai berikut :

#### **1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.**

Program ini bertujuan sebagai media pendukung pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang mana kebijakannya mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan prima bidang administrasi perkantoran. Indikator hasil dari program ini adalah tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Kegiatannya adalah:

##### ***1.1 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.***

Sifat kegiatan dari program ini merupakan kegiatan rutinitas pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran yang terdiri dari sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran.

#### **2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur.**

Program ini dimaksudkan untuk pemenuhan kebutuhan pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana perkantoran pemerintah. Kegiatannya adalah:

##### ***2.1 Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur.***

Indikator hasil yang diharapkan dari kegiatan ini tersedianya, meningkatnya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur.

### **3. Program Pengelolaan, Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.**

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kota Batam dalam melaksanakan pembangunan.

Kegiatan dari program ini terdiri dari:

#### *3.1 Penyusunan APBD Kota Batam;*

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya APBD Kota Batam T.A 2017-2021.

#### *3.2 Koordinasi, Evaluasi dan Sinkronisasi Dana Perimbangan, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah;*

Indikator hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terkoordinasi dan tersedianya data dana perimbangan, dana bagi hasil dan PAD.

#### *3.3 Pengelolaan Penggajian PNS Pemerintah Kota Batam;*

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya Buku Laporan Pengelolaan Penggajian PNS Pemerintah Kota Batam.

#### *3.4 Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;*

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya Dokumen (Buku Sistem dan Prosedur).

#### *3.5 Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Kota Batam;*

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Kota Batam berbasis aktual.

#### *3.6 Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;*

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

#### *3.7 Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah;*

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya Asistensi Penyusunan laporan Keuangan Daerah.

#### *3.8 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;*

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya Buku Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A 2016-2021.

#### *3.9 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Batam;*

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Batam T.A 2016-2021.

#### *3.10 Workshop Akuntansi dan Perbendaharaan Keuangan Daerah;*

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya Workshop Akuntansi dan Perbendaharaan Keuangan Daerah.

#### *3.11 Penyusunan Perubahan APBD Kota Batam;*

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya Buku Perda Perubahan APBD Kota Batam.

#### *3.12 Penyusunan Standarisasi Harga Barang/Jasa;*

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya Dokumen Standarisasi dan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kota Batam.

#### *3.13 Koordinasi, Sinkronisasi dan Asistensi Status Aset Daerah Kota Batam;*

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen Laporan Aset Pemerintah Kota Batam yang Akurat.

#### *3.14 Pengamanan Aset Daerah Kota Batam;*

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemasangan plang nama pengamanan aset Pemko Batam.

#### *3.15 Pemanfaatan, Penilaian dan Pemindahtanganan Aset Pemerintah Kota Batam;*

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen penilaian, pemanfaatan dan pemindahtanganan.

#### *3.16 Operasional BLUD Dana Bergulir;*

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah meningkatkan dukungan dan fasilitas UKM dan Koperasi dalam pembiayaan.

#### *3.17 Penyusunan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah;*

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya Buku Perda Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### *3.18 Penyusunan Perda Pengelolaan Barang Milik daerah;*

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya Buku Perda dan Perwako Pengelolaan Barang Milik Daerah.

#### *3.19 Pedoman Penyusunan APBD;*

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya Buku Perwako Penyusunan APBD dan Perjalanan Dinas T.A 2018.

### *3.20 Sensus Barang Milik Daerah;*

Indikator hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersusunnya Dokumen Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Batam tahun 2018.

### *3.21 Penataan Sistem Dokumen Keuangan;*

Indikator hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersedianya Sarana Penyimpanan, Pengklasifikasian Data, Pengolahan Updating dan Analisis Arsip.

Rencana program, kegiatan OPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam beserta indikator, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatif sebagaimana dapat dilihat pada tabel 5.1.



**Tabel 5.1**  
**Target Kinerja Program Kegiatan Dan Kerangka Pendanaan**  
**Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2017-2021**

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KET
			TAHUN -1 (2017)		TAHUN -2 (2018)		TAHUN -3 (2019)		TAHUN -4 (2020)		TAHUN -5 (2021)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA OPD		
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi PD Kota Batam</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>3,215,825,180.00</b>	<b>100%</b>	<b>3,280,141,683.60</b>	<b>100%</b>	<b>3,345,744,517.27</b>	<b>100%</b>	<b>3,412,659,407.62</b>	<b>100%</b>	<b>3,583,292,378.00</b>	<b>100%</b>	<b>16,837,663,166.49</b>	
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Perlengkapan administrasi perkantoran	-	100%	3,215,825,180.00	100%	3,280,141,683.60	100%	3,345,744,517.27	100%	3,412,659,407.62	100%	3,583,292,378.00	100% Pertahun Selama 5 Tahun	16,837,663,166.49	Bidang Anggaran

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KET
			TAHUN -1 (2017)		TAHUN -2 (2018)		TAHUN -3 (2019)		TAHUN -4 (2020)		TAHUN -5 (2021)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA OPD		
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD Kota Batam	0%	100%	1,526,900,000.00	100%	1,520,000,000.00	100%	1,900,000,000.00	100%	1,330,000,000.00	100%	1,356,600,000.00	100%	7,633,500,000.00	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur	-	100%	1,526,900,000.00	100%	1,520,000,000.00	100%	1,900,000,000.00	100%	1,330,000,000.00	100%	1,356,600,000.00	100% Pertahun Selama 5 Tahun	7,633,500,000.00	Bidang Aset
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini Pemeriksaan BPK	Opini WTP	Opini WTP	7,060,674,000.00	Opini WTP	7,696,134,660.00	Opini WTP	7,514,484,393.20	Opini WTP	7,603,847,761.06	Opini WTP	7,783,624,843.19	Opini WTP	37,613,765,657.45	

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KET
			TAHUN -1 (2017)		TAHUN -2 (2018)		TAHUN -3 (2019)		TAHUN -4 (2020)		TAHUN -5 (2021)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA OPD		
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyusunan APBD Kota Batam	Dokumen (APBD)	9 Dokumen	18 Dokumen	415,000,000.00	9 Dokumen	300,150,000.00	9 Dokumen	305,000,000.00	9 Dokumen	310,000,000.00	9 Dokumen	315,000,000.00	9 Dokumen Pertahun Selama 5 Tahun	1,645,150,000.00	Bidang Anggaran
Koordinasi , Evaluasi Dan Sinkronisasi Dana Perimbangan, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah	Dokumen (Data dana perimbangan, dana bagi hasil dan PAD)	2 Dokumen	5 Dokumen	338,200,000.00	5 Dokumen	344,964,000.00	5 Dokumen	351,863,280.00	5 Dokumen	358,900,545.60	5 Dokumen	366,078,556.51	5 Dokumen Pertahun Selama 5 Tahun	1,760,006,382.11	Bidang Anggaran
Pengelolaan Penggajian PNS Pemerintah Kota Batam	Dokumen (Buku Laporan Pengelolaan Penggajian PNS Pemerintah Kota Batam)	2 Dokumen	2 Dokumen	53,710,000.00	2 Dokumen	54,784,200.00	2 Dokumen	55,879,884.00	2 Dokumen	56,997,481.68	2 Dokumen	58,137,431.31	2 Dokumen Pertahun Selama 5 Tahun	279,508,996.99	Bidang Perbendaharaan

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KET
			TAHUN -1 (2017)		TAHUN -2 (2018)		TAHUN -3 (2019)		TAHUN -4 (2020)		TAHUN -5 (2021)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA OPD		
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen (Buku Sistem dan Prosedur)	3 Dokumen	3 Dokumen	344,200,000.00	3 Dokumen	351,084,000.00	3 Dokumen	358,105,680.00	3 Dokumen	365,267,793.60	3 Dokumen	372,573,149.47	3 Dokumen Selama 5 Tahun	1,791,230,623.07	Bidang Perbendaharaan
Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Kota Batam	Sistem Aplikasi (SIPKD) berbasis akrual	Sistem Aplikasi (SIPKD) berbasis akrual	1 Paket Peningkatan Sistem Aplikasi SIPKD Lanjutan	1,051,300,000.00	1 Paket Peningkatan Sistem Aplikasi SIPKD Lanjutan	1,072,326,000.00	1 Paket Peningkatan Sistem Aplikasi SIPKD Lanjutan	1,093,772,520.00	1 Paket Peningkatan Sistem Aplikasi SIPKD Lanjutan	1,115,647,970.40	1 Paket Peningkatan Sistem Aplikasi SIPKD Lanjutan	1,137,960,929.81	1 Paket Peningkatan Sistem Aplikasi SIPKD Lanjutan Selama 5 Tahun	5,471,007,420.21	Bidang Perbendaharaan
Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Bimbingan Teknis Dan Sosialisasi	150 Orang	675 Orang	407,925,000.00	675 Orang	416,083,500.00	675 Orang	424,405,170.00	675 Orang	432,893,273.40	675 Orang	441,551,138.87	675 Orang Peserta Tahunan Selama 5 Tahun	2,122,858,082.27	Bidang Anggaran

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KET
			TAHUN -1 (2017)		TAHUN -2 (2018)		TAHUN -3 (2019)		TAHUN -4 (2020)		TAHUN -5 (2021)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA OPD		
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah	Dokumen (Laporan Keuangan Daerah Sesuai SAP Berbasis Akrua)	7 Dokumen	8 Dokumen	493,700,000.00	8 Dokumen	503,574,000.00	8 Dokumen	513,645,480.00	8 Dokumen	523,918,389.60	8 Dokumen	534,396,757.39	8 Dokumen Selama 5 Tahun	2,569,234,626.99	Bidang Akuntansi
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen (Evaluasi APBD)	6 Dokumen	6 Dokumen	133,250,000.00	6 Dokumen	135,915,000.00	6 Dokumen	138,633,300.00	6 Dokumen	141,405,966.00	6 Dokumen	144,234,085.32	6 Dokumen Selama 5 Tahun	693,438,351.32	Bidang Akuntansi
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Walikota Batam	Dokumen (Evaluasi Kinerja dan Pertanggungjawaban Walikota)	2 Dokumen	2 Dokumen	45,125,000.00	2 Dokumen	46,027,500.00	2 Dokumen	46,948,050.00	2 Dokumen	47,887,011.00	2 Dokumen	48,844,751.22	2 Dokumen Selama 5 Tahun	234,832,312.22	Bidang Akuntansi

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KET
			TAHUN -1 (2017)		TAHUN -2 (2018)		TAHUN -3 (2019)		TAHUN -4 (2020)		TAHUN -5 (2021)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA OPD		
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Workshop Akuntansi dan Perbendaharaan Keuangan Daerah	Workshop	Workshop	100 Orang/Peserta	582,900,000.00	60 Orang/Peserta	361,398,000.00	100 Orang/Peserta	606,216,000.00	60 Orang/Peserta	384,714,000.00	120 Orang/Peserta	630,091,584.00	440 Orang/Peserta Selama 5 Tahun	2,565,319,584.00	Bidang Akuntansi
Penyusunan Perubahan APBD Kota Batam	Dokumen (Perubahan APBD)	9 Dokumen	9 Dokumen	227,000,000.00	9 Dokumen	231,540,000.00	9 Dokumen	236,170,800.00	9 Dokumen	240,894,216.00	9 Dokumen	245,712,100.32	9 Dokumen Tahunan Selama 5 Tahun	1,181,317,116.32	Bidang Anggaran
Penyusunan Standarisasi Harga Barang/Jasa	Dokumen (Standarisasi dan Harga Barang/Jasa)	2 Dokumen	2 Dokumen	333,500,000.00	2 Dokumen, 1 Paket Sistem	440,170,000.00	2 Dokumen, 1 Paket Sistem Lanjutan	448,973,400.00	2 Dokumen, 1 Paket Sistem Lanjutan	457,952,868.00	2 Dokumen, 1 Paket Sistem Lanjutan	467,111,925.36	2 Dokumen Tahunan Selama 5 Tahun, 1 Paket Sistem	2,147,708,193.36	Bidang Aset

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KET
			TAHUN -1 (2017)		TAHUN -2 (2018)		TAHUN -3 (2019)		TAHUN -4 (2020)		TAHUN -5 (2021)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA OPD		
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Koordinasi, Sinkronisasi dan Asistensi Status Aset Daerah Kota Batam	Dokume (Status Aset)	Dokumen (Status Aset)	2 Dokume n	443,000,000.00	3 Dokume n	700,000,000.00	2 Dokmen	650,000,000.00	2 Dokmen	650,000,000.00	1 Dokume n	600,000,000.00	10 Dokumen Selama 5 Tahun	3,043,000,000.00	Bidang Aset
Pengamanan Aset Daerah Kota Batam	Plang Nama Aset	Plang Nama Aset	65 Titik lokasi	827,500,000.00	65 Titik lokasi	400,500,000.00	65 Titik lokasi	410,000,000.00	65 Titik lokasi	420,000,000.00	65 Titik lokasi	425,000,000.00	325 Titik lokasi Selama 5 Tahun	2,483,000,000.00	Bidang Aset
Pemanfaatan, Penilaian dan Pemindatangan Aset Pemerintah Kota Batam	Dokumen (Data pemanfaatan, penilaian dan pemindahtangan aset)	Dokumen (Data pemanfaatan, penilaian dan pemindahtangan aset)	1 Dokume n	180,800,000.00	1 Dokume n	225,000,000.00	1 Dokume n	250,000,000.00	1 Dokume n	260,000,000.00	1 Dokume n	285,000,000.00	1 Dokumen Pertahun Selama 5 Tahun	1,200,800,000.00	Bidang Aset

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KET
			TAHUN -1 (2017)		TAHUN -2 (2018)		TAHUN -3 (2019)		TAHUN -4 (2020)		TAHUN -5 (2021)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA OPD		
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Operasionalisasi BLUD Dana Bergulir	Operasionalisasi	Operasionalisasi	100%	786,514,000.00	100%	900,000,000.00	100%	1,000,000,000.00	100%	1,200,000,000.00	100%	1,300,000,000.00	100% Pertahun Selama 5 Tahun	5,186,514,000.00	BLUD
Penyusunan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen	Dokumen	5 Dokumen	205,050,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5 Dokumen Selama 5 Tahun	205,050,000.00	Bidang Akuntansi
Penyusunan Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen (Perda dan Perwako Pengelolaan Keuangan Daerah)	Dokumen (Perda dan Perwako Pengelolaan Barang Milik Daerah)	6 Dokumen	132,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6 Dokumen Selama 5 Tahun	132,000,000.00	Bidang Aset



PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KET
			TAHUN -1 (2017)		TAHUN -2 (2018)		TAHUN -3 (2019)		TAHUN -4 (2020)		TAHUN -5 (2021)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA OPD		
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pedoman Penyusunan APBD	Dokumen (Perwako Penyusunan APBD dan Perjalanan Dinas)	Dokumen (Perwako Penyusunan APBD dan Perjalanan Dinas)	2 Dokumen	60,000,000.00	2 Dokumen	61,200,000.00	2 Dokumen	62,424,000.00	2 Dokumen	63,672,480.00	2 Dokumen	64,945,929.60	2 Dokumen Tahun Selama 5 Tahun	312,242,409.60	Bidang Anggaran
Sensus Barang Milik Daerah	Dokumen (Hasil Sensus Barang)	Dokumen (Sensus Barang Tahun 2013)	-	-	1 Dokumen	600,000,000.00	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen Selama 5 Tahun	600,000,000.00	Bidang Aset
Penataan Sistem Dokumen Keuangan	Sistem Penyelamatan Dokumen	-	-	-	-	551,418,460.00	1 Paket Sistem	562,448,829.20	1 Paket Sistem Lanjutan	573,695,765.78	1 Paket Sistem Lanjutan	301,986,504.00	Sistem Penyelamatan Dokumen 1 Paket Tahun Selama 4 Tahun	1,989,547,558.98	Bidang Anggaran

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Rencana strategis OPD BPKAD Kota Batam 2016-2021 merupakan serangkaian tindakan yang disusun dengan melibatkan seluruh jajaran organisasi dengan harapan bahwa rencana strategik ini dapat diimplementasikan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Seluruh rangkaian tindakan yang tertuang dalam renstra ini merupakan upaya menggali berbagai potensi sumber daya yang ada dan memperkuat tujuan pencapaian visi Kota Batam. Dengan telah disepakati renstra ini, maka untuk menjamin keberhasilan dalam pelaksanaannya perlu segera melaksanakan konsolidasi ke dalam sehingga timbul persepsi yang sama dalam mengaktualisasikan pada bidang tugas masing-masing. BPKAD Kota Batam harus dapat meningkatkan komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar perangkat daerah dengan harapan bahwa arus informasi yang diterima merupakan salah satu aspek penentu keberhasilan/kegagalan pelaksanaan visi dan misi.

Rencana strategis yang telah disusun diharapkan mampu memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi atau kemungkinan yang akan timbul di kemudian hari, oleh karena itu komitmen di antara semua jajaran harus dijunjung tinggi sehingga Visi Pembangunan Kota Batam lima tahun mendatang (2016-2021) yaitu *“Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera Dan Bermartabat”*, selaras dengan Visi RPJMN 2015-2019 yang bertujuan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong dalam hal menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berlandaskan pada pemberdayaan sumber daya manusia dapat tercapai.

Batam, 30 Januari 2017

**Kepala Badan Pengelolaan Keuangan  
Dan Aset Daerah Kota Batam,**

**ABD. MALIK, SE, M.Si**

Pembina TK.I

NIP.19660727 199603 1 003